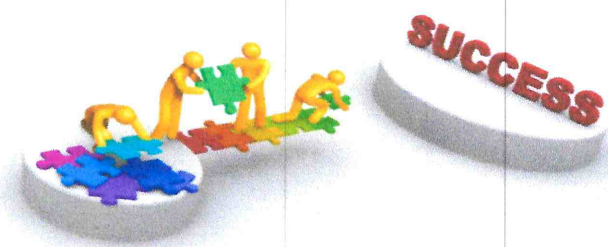




**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**DALEV RENJA
TRIWULAN I
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020 telah dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi, dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan, kemudian Hasil evaluasi Renja PD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi untuk tahun berikutnya.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja PD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah tahun 2020. Evaluasi hasil Renja PD ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA Perangkat Daerah dengan indikator target kinerja anggaran dalam Renja PD Tahun 2019. Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Renja Inspektorat Daerah untuk tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung tercapainya kinerja untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, April 2020

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Renja	3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	
2.1 Gambaran Umum	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	7
2.4 Rencana Program dan Kegiatan	9
2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA	14
2.6 Capaian Kinerja Program Kegiatan	19
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI	
3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun Anggaran 2020.....	24
3.2 Saran Tindak Lanjut	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Rekomendasi	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	9
Tabel 2.4.1	Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020	10
Tabel 2.4.2	Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	11
Tabel 2.5.1	Perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022	14
Tabel 2.5.2	Kesesuaian antara Program/Kegiatan didalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022.....	16
Tabel 2.5.3	Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Renja.....	17
Tabel 2.6	Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	5
Gambar 2.4.1	Anggaran Belanja langsung dan Tidak Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar 2.4.2	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020	11
Gambar 2.4.3	Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi	13
Gambar 2.5.1	Jumlah Program Renja 2020 dan Renstra 2017-2022	15
Gambar 2.5.1	Jumlah Kegiatan Renja 2020 dan Renstra 2017-2022	15
Gambar 2.6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2020.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tahun kedua Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja K/L terkait dan dipadukan dengan Rencana Kerja pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS hingga sampai dengan proses penyusunan APBD Tahun 2020.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 28 Desember Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 03); dan
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 Nomor 31 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menetapkan target kinerja yang telah dicapai sebagai acuan untuk pengukuran kinerja tahun berikutnya dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah;

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
2. Mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Mensinergikan sasaran yang dicapai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap indikator kinerja program/kegiatan untuk mengukur realisasi anggaran dan realisasi kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja

Adapun sistematika penyusunan laporan pengendalian evaluasi hasil rencana kerja (Dalev Renja) triwulan I Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

- 2.1 Gambaran Umum
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.4 Rencana Program dan Kegiatan
- 2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA
- 2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

BAB III KENDALA DAN SASARAN TINDAK LANJUT

- 3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun Anggaran 2020
- 3.2 Saran Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

2.1 Gambaran Umum

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dengan jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 3 (tiga) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
 4. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:

GAMBAR 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penetapan petunjuk dan pedoman yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok *membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta menyelenggarakan fungsi pengawasan antara lain, yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan.*

Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022:

Visi

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

Misi V

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang berkualitas (bersih dan akuntabel)	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Kepatuhan thd ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Menurunnya materialitas temuan hasil pemeriksaan
			2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatnya Kematangan Implementasi Maturitas SPIP	Meningkatnya unit kerja dengan Maturitas SPIP level 3

			3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi	Meningkatnya Nilai Evaluasi Internal	Meningkatnya PD yang memperoleh nilai SAKIP "A"
			4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP

2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2020, meliputi:

1. Berdasarkan analisis, maka strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan Rencana Kerja Mendorong Percepatan dan peningkatan penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik, mulai dari program perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset hingga monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pihak- pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pembinaan secara kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Audit, Reviu, konsultasi, pemantauan dan pengawasan lain, baik pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, reviu terhadap LKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Melakukan evaluasi yang lebih fokus dan berkualitas terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaporan dan kotak pengaduan;
6. Penyelesaian Tindak Lanjut secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil temuan pengawasan;

7. Memberikan kesempatan kepada tenaga aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Memaksimalkan sistem Satuan Tugas SPIP (SISATGAS SPIP) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Memaksimalkan Peran APIP sebagai katalis dalam pendampingan dan asistensi serta memperbanyak volume konsultasi kepada setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara lebih *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang berdasarkan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi teknis keahlian tertentu.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel. 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi			
<i>"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"</i>			
Misi V			
<i>"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Strategi 1.1 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi
	Sasaran 1.2 Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Strategi 1.2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
Tujuan 2: Meningkatkan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Sasaran 2.1 Menurunnya jumlah temuan bersifat materiil pada OPD	Strategi 2.1 Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dan peta resiko pengawas

2.4 Rencana Program dan Kegiatan

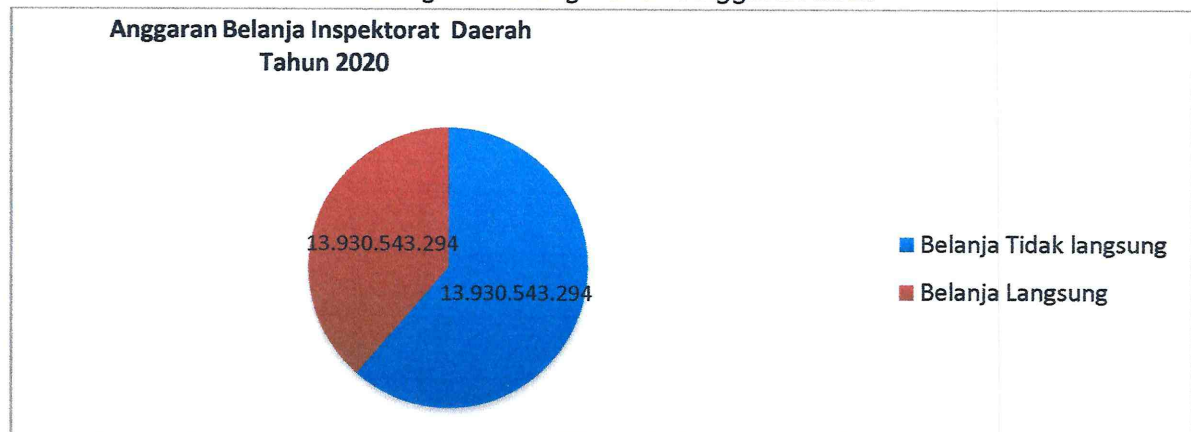
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 27.048.256.516,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.117.713.222,- dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 13.930.543.294,- terdiri dari 4 Program dengan 23 kegiatan.

Tabel 2.4.1
Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020

No.	Belanja	Belanja Tidak langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	APBD	Rp. 13.117.713.222,-	Rp. 13.930.543.294,-	Rp. 27.048.256.516,-

Gambar 2.4.1

Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020



Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur khususnya visi misi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4.2



Tabel. 2.4.2

Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan

KETERKAITAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

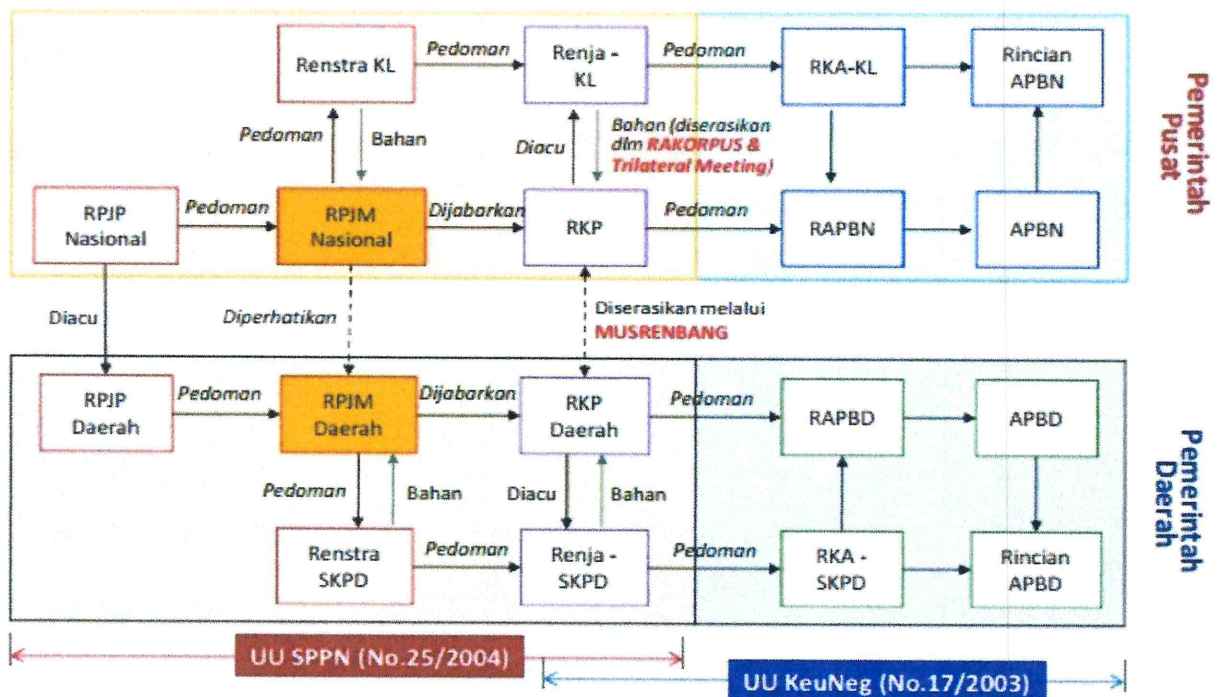
Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya

	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%
	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korsupgah
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota
		Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI
		Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi
		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS
		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan
Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL Penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah
	Prosentase penyelesaian kasus	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti

	pengaduan masyarakat	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Maturitas SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap PD
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat Akurasi Data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP
		Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas

Gambar 2.4.3

Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Terkait Pentingnya Evaluasi



2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA

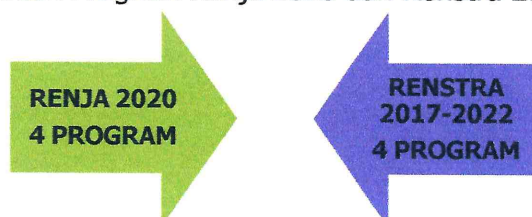
Adapun perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2020 dan Renstra 2017-2022 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5.1

No.	PROGRAM	KEGIATAN RENJA 2020	KEGIATAN RENSTRA 2017-2022
I	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel
		Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota
		Penilaian Internal Zona Integritas	Penilaian Internal Zona Integritas
		Monev Laporan Gratifikasi	Monev Laporan Gratifikasi
		Penanganan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System
		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN
III	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah
		Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah

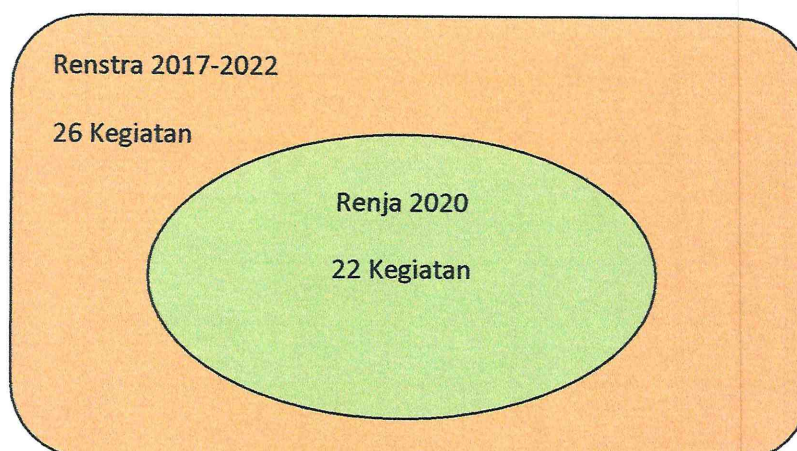
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
		Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung
IV	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah
		Survey Penilaian Integritas	Survey Penilaian Integritas

Gambar 2.5.1
Jumlah Program Renja 2020 dan Renstra 2017-2022



Dari seluruh kegiatan yang ada didalam Renstra 2017-2022 sebanyak 26 kegiatan, tetapi hanya 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2020.

Gambar 2.5.2
Jumlah Kegiatan Renstra 2017-2022 dan Renja 2020



Tabel 2.5.2

Kesesuaian antara Program/Kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020 dan Renstra PD 2017-2022 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020	Program/kegiatan di dalam Renstra PD 2017-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Sesuai
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sesuai
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sesuai
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sesuai
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Sesuai
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sesuai
II	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	Sesuai
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Sesuai
2	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Sesuai
3	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Sesuai
4	Penilaian Internal Zona Integritas	Penilaian Internal Zona Integritas	Sesuai
5	Monev Laporan Gratifikasi	Monev Laporan Gratifikasi	Sesuai
6	Penanganan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System	Sesuai
7	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	
III	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Sesuai

NO	Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020	Program/kegiatan di dalam Renstra PD 2017-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Sesuai
3	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Sesuai
4	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Sesuai
5	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Sesuai
6	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Sesuai
IV	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Sesuai
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sesuai
2	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Sesuai
3	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Sesuai
4	Survey Penilaian Integritas	Survey Penilaian Integritas	Sesuai

Tabel. 2.5.3
Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Renja 2020

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran pada Renstra	Renja T.A 2020
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan					
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100 %	2.050.000.000	1.816.900.000
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100 %	7.961.000.000	8.638.410.000
3.	Kegiatan Peningkatan	Prosentase jumlah	100%		529.000.000

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya		689.000.000	
4.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dg tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	32.000.000	16.719.206
5.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	84.000.000	12.700.000
Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan aparatur					
1.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	363.000.000	75.350.000
2.	Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korsupgah	100 %	140.000.000	10.250.000
3.	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota	8 LHE	300.000.000	250.000.000
4.	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	5Unit Kerja	250.000.000	16.950.000
5.	Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	165.000.000	31.799.800
6.	Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 Laporan	135.000.000	55.000.000
7.	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	100 %	158.864.490	158.864.490
Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
1.	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	15%	611.100.000	98.000.000
2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaaan Kinerja	150 obrik	3.087.000.000	2.787.000.000
3.	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 PKPT	329.000.000	203.719.000

4.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	150 Obrik	800.000.000	593.950.000
5.	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 Laporan	417.000.000	325.000.000
6.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	15 laporan	270.112.000	235.000.000
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya					
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap PD	42 PD	275.625.000	45.799.750
2.	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat Akurasi Data atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	100 %	178.957.000	80.000.000
3.	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP	100 Peserta	375.000.000	245.885.000
4	Survey Penilaian Integritas	Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas	1 Laporan	-	200.000.000
TOTAL				18.671.658.490	16.441.297.246

2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi anggaran pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) Tahun 2020.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan I Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	10.039.987.500	-	546.708.253	-	546.708.253	25,01	5,45
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.688.502.500	25 %	382.023.253	25 %	382.023.253	25 %	22,62 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	7.856.710.000	25 %	40.835.000	25 %	40.835.000	25 %	0,52 %
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	460.000.000	25 %	115.200.000	25 %	115.200.000	25 %	25,92 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	4 dokum en	4.200.000	1 dokume n	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	25 %	24,51 %
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7 laporan	3.900.000	2 laporan	3.650.000	2 laporan	3.650.000	28,57 %	12,22 %
Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur		421.960.000	-	64.875.000	-	64.875.000	28,94	15,37 %
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel	4 laporan	94.800.000	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-	100 %	98.300.000	95%	53.050.000	95%	53.050.000	95%	53,97 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan I Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
LHKPN								
Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Terintegrasi dan Korsupgah	4 Laporan	9.030.000	25%	250.000	1 laporan	250.000	25 %	2,77 %
Penanganan Whistle Blower System	12 laporan	31.010.000	3 laporan	3.825.000	3 laporan	3.825.000	25 %	12,33 %
Evaluasi Lakip/EKPPD/LP PD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	149.800.000	1 dokumen	7.750.000	1 dokumen	7.750.000	12,5%	5,17 %
Penilaian Internal Zona Integritas	5 unit kerja	18.860.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Monev Laporan Gratifikasi	12 laporan	20.160.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Progrm Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		2.965.510.794		426.686.000	-	426.686.000	13,34%	9,95%
Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	15 %	84.200.000	2 %	975.000	2 %	975.000	13,33%	1,16%
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	150 obrik	1.857.000.000	24 obrik	213.225.000	24 obrik	213.225.000	16,00%	11,48
Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	2 Rakor 1 PKPT	187.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	150 obrik	468.250.000	20 obrik	64.550.000	20 obrik	64.550.000	13,33%	13,79 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Triwulan I Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan I Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 laporan	182.128.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	15 laporan pengaduan	186.032.794	2 laporan	21.461.000	2 laporan	21.461.000	13,33 %	11,43 %
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya		503.085.000		900.000	-	900.000	1,23%	0,18%
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	42 PD	43.250.000	12 PD	900.000	12 PD	900.000	28,57%	2,08%
Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan (Upgrading)	100 %	69.750.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	100 Peserta	250.085.000	0	0	0	0	0	0
Survey Penilaian Integritas	1 Laporan	140.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		13.930.543.294			907.694.253		21,73	6,52
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)							21,73%	6,52%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)							SR	SR

Keterangan:

SR	: Sangat Rendah	(≤ 50 %)
R	: Rendah	(51 % ≤ 65 %)
S	: Sedang	(66 % ≤ 75 %)
T	: Tinggi	(76 % ≤ 90 %)

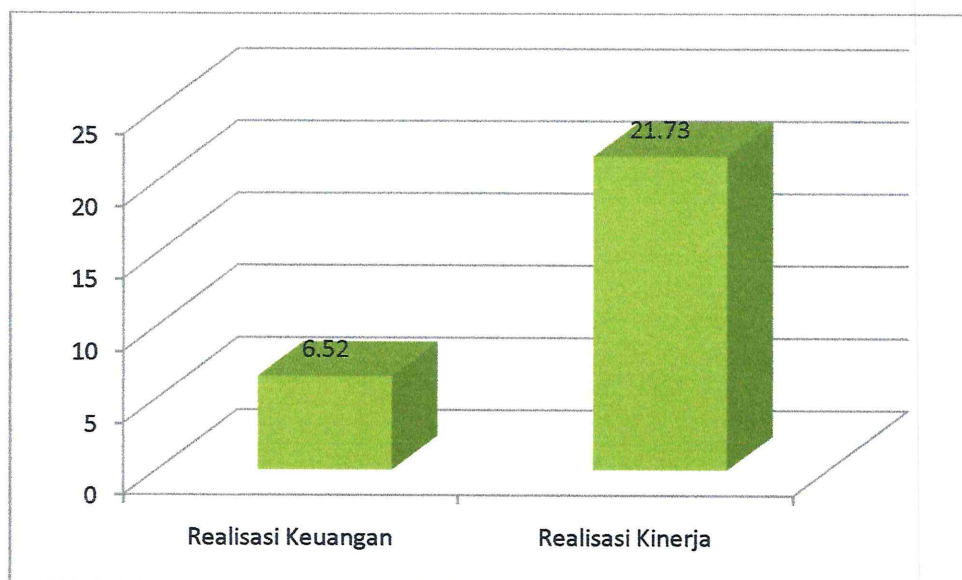
ST : Sangat Tinggi (91 % ≤ 100 %)

Berdasarkan Tabel 2. di atas terlihat bahwa dari 23 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2019, ada 19 kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan realisasi keuangan dan kinerja. Sehingga untuk rata-rata capaian realisasi anggaran pada Triwulan I sebesar 6,52 % dan realisasi kinerja untuk seluruh program/kegiatan sebesar 21,73% dengan predikat Sangat Rendah (SR).

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD Tahun 2020 penjabarannya tertuang pada formulir E.81 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran*.

Gambar 2.6

Grafik Realisasi Anggaran dan Kinerja Renja 2020 Triwulan I



BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2020, dapat dikemukakan bahwa realisasi anggaran sebesar 6,52 % dan kinerja sebesar 21,73 %.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak penegak hukum, tetapi tupoksi dan penganggaran kegiatannya ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intens dan pelaksanaannya tergantung pada aparat penegak hukum;
2. Adanya kegiatan yang jadwal pelaksanaannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya;
3. Adanya kegiatan yang pelaksanaannya telah dilaksanakan tetapi secara sistem administrasi keuangan belum dilakukan proses pencairan karena kekurangan anggaran kas;
4. Adanya kegiatan belanja modal pada kegiatan peningkatan sarana prasarana yaitu Pembangunan Gedung Kantor, yang mana proses pembangunannya dibatalkan akibat adanya pandemi wabah covid-19;
5. Tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan akibat pandemi wabah covid-19.

3.3 Saran Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
3. Mempercepat proses administrasi dari pelaksanaan kegiatan;
4. Mengoptimalkan perhitungan anggaran kas terhadap kegiatan yang dilaksanakan; dan
5. Bersama untuk menjaga pola hidup sehat dan pysichal distancing.

BAB IV

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target realisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I Tahun 2020 untuk rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 6,52 % dengan predikat Sangat Rendah (SR) dan capaian kinerja seluruh program/kegiatan sebesar 21,73 % dengan predikat Sangat Rendah (SR);
2. Adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan I, tetapi akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
3. Tertundanya beberapa kegiatan tertentu akibat pandemi wabah virus corona (covid 19).

5.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya perbaikan pencapaian target kinerja di Triwulan I Tahun 2020 maka telah dilakukan sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
2. Melakukan pertemuan secara berkala dengan PPTK terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal; dan
3. Mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan target kinerja agar realisasi fisik/kinerja kegiatan dapat tercapai.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) triwulan I tahun 2020 ini dibuat dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam meningkatkan kinerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, April 2020

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001



LAMP PIRAN

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020

TRIWULAN I

INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n- 1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggungjua wab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		-																									
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)		11.924.000.000		5.649.028.179		10.039.987.500		546.708.253							546.708.253	#DIV/0!	5,45%	0,00	6.195.736.432	#DIV/0!	51,96%			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100,00	2.260.000.000	100,00	3.637.514.733	100,00	1.688.502.500	25	382.023.253						25	382.023.253	25,00%	22,62%		4.019.537.986		177,86%		Tidak Ada()	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 bulan (%)	100,00	8.777.000.000	100,00	1.063.931.413	100,00	7.856.710.000	25	40.835.000						25	40.835.000	25,00%	0,52%		1.104.766.413		12,59%		Lain-lain(Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Batal dilaksanakan karena adanya pandemi penyebaran virus covid-19)	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	100,00	759.000.000	100,00	891.805.983	100,00	444.500.000	25	115.200.000						25	115.200.000	25,00%	25,92%		1.007.005.983		132,68%		Tidak Ada()	
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	4,00	92.000.000	4,00	39.126.350	4,00	20.400.000	1,00	5.000.000						1	5.000.000	25,00%	24,51%		44.126.350		47,96%		Tidak Ada()	
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	7,00	36.000.000	7,00	16.649.700	7,00	29.875.000	2,00	3.650.000						2	3.650.000	28,57%	12,22%		20.299.700		56,39%		Tidak Ada()	
									10.039.987.500										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,01%	5,45%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																									
		Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur			1.611.000.000		211.720.680		421.960.000		64.875.000							64.875.000	#DIV/0!	15,37%	0,00	276.595.680	#DIV/0!	17,17%			
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (laporan)	4,00	400.000.000	50,00	140.542.230	4	94.800.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%		140.542.230		35,14%		Lain-lain(Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya)	

		Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	0,00	-	100,00	56.267.450	100	98.300.000	95	53.050.000						95	53.050.000	95,00%	53,97%		109.317.450		#DIV/0!		Tidak Ada()				
		Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korusupah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korusupah	4,00	170.000.000	50,00	-	100	9.030.000	25	250.000						25	250.000	25,00%	2,77%		250.000		0,15%		Tidak Ada()				
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota	8,00	350.000.000	100,00	-	8	149.800.000	1	7.750.000						1	7.750.000	12,50%	5,17%		7.750.000		2,21%		Tidak Ada()				
		Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah unit kerja Zona Integritas (Dokumen)	5,00	350.000.000	100,00	1.981.000	5	18.860.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%		1.981.000		0,57%		Lain-lain(Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya)				
		Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi (Laporan)	12,00	185.000.000	100,00	12.930.000	12	20.160.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%		12.930.000		6,99%		Lain-lain(Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya)				
		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah pengaduan melalui Whistle Blower System (laporan)	12,00	156.000.000	100,00	-	12	31.010.000	3	3.825.000						3	3.825.000	25,00%	12,33%		3.825.000		2,45%		Tidak Ada()				
									421.960.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										28,94%	15,37%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah							2.965.510.794		294.236.000							295.211.000	#DIV/0!	9,95%	0,00	295.211.000	#DIV/0!	#DIV/0!						
		Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah (%)	20,00	674.000.000	15,00	284.954.000	15	84.200.000	2	975.000						2	975.000	13,33%	1,16%		285.929.000		42,42%		Tidak Ada()				
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Perangka Daerah yang diawasi terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja (obrik)	160,00	3.403.000.000	150,00	5.389.774.183	150	1.857.000.000	24	213.225.000						24	213.225.000	16,00%	11,48%		5.602.999.183		164,65%		Tidak Ada()				
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rakor yang dilaksanakan terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (rakor)	2,00	363.000.000	2,00	225.493.478	1	187.900.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%		225.493.478		62,12%		Lain-lain(Pelaksanaan kegiatan tertunda dikarenakan adanya pandemi penyebaran wabah COVID-19)				
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK (obrik)	160,00	915.000.000	150,00	1.077.500.284	150	468.250.000	20	59.550.000						20	59.550.000	13,33%	12,72%		1.137.050.284		124,27%		Tidak Ada()				
		Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan tim satgas Saber pungli atas uang dan barang daerah (laporan)	2,00	460.000.000	2,00	364.056.700	2	182.128.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%		364.056.700		79,14%		Lain-lain(Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya)				

		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah (laporan pengaduan)	20,00	297.799.000	15,00	211.823.100	15	186.032.794	2	21.461.000							2	21.461.000	13,33%	11,54%		233.284.100		78,34%		Tidak Ada()
									2.965.510.794											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13,34%	9,95%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	-																900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	900.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas pemeriksaan APIP dan BPK (%)	100,00	197.300.000	100,00	62.856.459	100	69.750.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%		62.856.459		31,86%		Lain-lain(kegiatan dilaksanakan pada triwulan III)
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		42,00	303.876.000	42,00	157.829.110	42	43.250.000	6	900.000							6	900.000	14,29%	2,08%		158.729.110		52,23%		Tidak Ada()
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah		100,00	425.000.000	0,00	-	100	250.085.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%		-		0,00%		Tidak Ada()
		Survey Penilaian Integritas		0,00	-	0,00	-	1	140.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%		-		#DIV/0!		Lain-lain(Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya)
									503.085.000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	1,23%	0,18%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
									13.930.543.294											ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	21,73%	6,52%					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No.	Generated at: 08-04-2020 [12:35:55] By: User SKPD-17 dari EMONEV_babel	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2020
TRIWULAN I
INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

4.05.4.05.01.03.01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barano Daerah	84.200.000,00	0,00	1,16%	975.000,00	13,33%	0,08%	975.000,00	1,16%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.02	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.857.000.000,00	0,00	15,30%	284.100.000,00	16,00%	2,13%	213.225.000,00	11,48%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	187.900.000,00	0,00	94,15%	176.900.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Pelaksanaan kegiatan tertunda dikarenakan adanya pandemi penyebaran wabah covid-19	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
4.05.4.05.01.03.04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	468.250.000,00	0,00	12,76%	59.750.000,00	13,33%	0,45%	59.550.000,00	12,72%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.03.05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	182.128.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya	kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal rencana
4.05.4.05.01.03.07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	186.032.794,00	0,00	11,54%	21.461.000,00	13,33%	0,18%	21.461.000,00	11,54%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya										
4.05.4.05.01.04.03	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	69.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	kegiatan dilaksanakan pada triwulan III	Dilaksanakan pada triwulan III
4.05.4.05.01.04.05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	43.250.000,00	0,00	2,08%	900.000,00	28,57%	0,09%	900.000,00	2,08%	Tidak Ada	
4.05.4.05.01.04.07	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	250.085.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
4.05.4.05.01.04.08	Survey Penilaian Integritas	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya	
		13.930.543.294,00	0,00	7,45%	1.037.919.253,00		21,83%	907.694.253,00	6,52%		



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Belitung Kelurahan Air Itam Telepon (0717) 439313 Fax. (0717) 434693 Pangkalpinang